



Empat Pejabat Tinggi Pesisir: Relasi Ingabehi Wangsareja dengan Mataram dan VOC pada Pertengahan Abad ke-17

Iqbal Rizaldin

Program Magister Sejarah, Departemen Ilmu
Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas
Gadjah Mada

Email: iqbalrizaldin@gmail.com

Abstract

In the early period of his reign, Susuhunan Amangkurat I conducted various policy experiments aimed at managing the Coast. Therefore, the king appointed Ingabehi Wangsareja and other Coastal regents as the Four High Coastal Officials. This study aims to determine the relationship established by Ingabehi Wangsareja as one of the Four High Coastal Officials with Mataram and the VOC and to relate it to various events that occurred in Java in the early modern period. The method used in this study is the historical method which begins with choosing a research topic, collecting research sources, conducting historical criticism, interpreting sources, and presenting them in the form of historical writing using a descriptive-analytical historical research approach. The spatial and temporal limitations of this study are the reign of Ingabehi Wangsareja in Semarang in 1652-1659. The results of this study provide information that Susuhunan Amangkurat I only considered his subordinate regents as tools that could be replaced at any time. This condition forced the Four High Coastal Officials to try to implement Mataram's policies as well as possible. Therefore, they approached the VOC secretly so that the palace policy could run smoothly and in their respective interests. However, in reality, Mataram's policies often failed because the Four High Coastal Officials had to compete with each other to secure their positions and please the king. Unfortunately, Ingabehi Wangsareja became the scapegoat for the failure so he was dismissed from his position and then executed in 1659.

Keywords: *The Four Coastal High Officials, Ingabehi Wangsareja, Mataram, VOC, Semarang*

Abstrak

Pada masa awal pemerintahannya, Susuhunan Amangkurat I melakukan berbagai eksperimen kebijakan yang bertujuan untuk mengelola Pesisir. Oleh karena itu, raja mengangkat Ingabehi Wangsareja dan para bupati Pesisir lainnya sebagai Empat Pejabat Tinggi Pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana relasi yang dijalin oleh Ingabehi Wangsareja sebagai salah satu dari Empat Pejabat Tinggi Pesisir dengan Mataram dan VOC serta



mengaitkannya dengan berbagai peristiwa yang terjadi di Jawa pada masa modern awal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang dimulai dengan memilih topik penelitian, mengumpulkan sumber penelitian, melakukan kritik sejarah, menginterpretasi sumber, dan menyajikannya ke dalam bentuk tulisan sejarah dengan menggunakan pendekatan penelitian sejarah yang deskriptif-analisis. Batasan spasial dan temporal dari penelitian ini adalah masa pemerintahan Ingabehi Wangsareja di Semarang pada 1652-1659. Hasil dari penelitian ini memberikan informasi bahwa Susuhunan Amangkurat I hanya menganggap para bupati bawahannya sebagai alat yang bisa diganti sewaktu-waktu. Kondisi itu memaksa Empat Pejabat Tinggi Pesisir berusaha menjalankan kebijakan Mataram sebaik mungkin. Oleh karena itu, mereka mendekati VOC secara diam-diam agar kebijakan kraton dapat berjalan lancar dan demi kepentingannya masing-masing. Namun, pada kenyataannya, kebijakan Mataram sering kali mengalami kegagalan karena Empat Pejabat Tinggi Pesisir harus bersaing satu sama lain agar bisa mengamankan jabatan dan menyenangkan hati raja. Sayangnya, Ingabehi Wangsareja menjadi kambing hitam atas kegagalan itu sehingga dia dipecat dari jabatannya dan kemudian dieksekusi pada tahun 1659.

Kata kunci: Empat Pejabat Tinggi Pesisir, Ingabehi Wangsareja, Mataram, VOC, Semarang.

PENDAHULUAN

Dalam konsep pemerintahan Jawa, seorang raja adalah pusat dunia yang menghubungkan antara mikrokosmos dan makrokosmos sehingga menjadikannya penguasa suci yang bisa diterima oleh masyarakat (Moertono, 1985: 42). Sayangnya, suksesi kerajaan Mataram yang silih berganti tidak selalu menghadirkan sosok raja yang sempurna sehingga ideologi penguasa suci tidak bisa menjadi kontrol yang efektif, terutama bagi vasal-vasal di Pesisir Utara Jawa yang jauh dari pusat kerajaan. Oleh karena itu, Mataram mencoba untuk menggunakan konsensus politik atas Pesisir Utara Jawa. Namun, konsensus politik itu sebenarnya semu karena Susuhunan Amangkurat I telah menyentralkan

kekuasaan di bawah genggamannya sesaat setelah dirinya naik takhta dengan menyingkirkan atau mengasingkan para pejabat senior Mataram yang berseberangan dengan kebijakannya (Graaf, 1987: 10-12).

Alih-alih menghormati raja, para bupati Pesisir cenderung berselimut ketakutan dan kekhawatiran sehingga seiring waktu memendam sikap anti Mataram dan berharap untuk dibebaskan suatu saat nanti. Dengan hadirnya VOC di Pesisir Utara Jawa—meski pengaruhnya masih sangat kecil saat itu, para bupati Pesisir melihat bahwa kekuatan asing itu dapat menjadi kekuatan alternatif yang bisa diterima, selain Mataram. Oleh karena itu, mereka banyak yang tergoda untuk menjalin hubungan dengan VOC untuk kepentingannya sendiri karena relasi dengan para bupati lainnya sering kali lebih banyak menimbulkan sentimen yang menyebabkan konflik berlarut-larut daripada dengan VOC (Nagtegaal, 1996: 45).

Penulisan sejarah tentang relasi-relasi yang dijalin oleh Ingabehi Wangsareja, baik sebagai bupati maupun salah satu dari Empat Pejabat Tinggi Pesisir dengan Mataram dan VOC memang telah dilakukan oleh para peneliti Indonesia dan asing. Amen Budiman (2021) mungkin menjadi peneliti Indonesia satu-satunya yang fokus membahas Semarang. Namun, Amen Budiman hanya membahas sekilas tentang Ingabehi Wangsareja karena sebagian besar tulisannya menggunakan sumber-sumber sekunder berupa koran atau buku untuk menulis karya-karyanya, seperti *de Locomotief* (1927), R. M. Ng, Tjokrohadiwikromo (1932/1934), W. Leertouwer (1941), Soekirno (1953), dan Anonim (1956). Padahal, tulisan Amen menjadi rujukan dan direproduksi oleh para peneliti lainnya ke dalam tulisan-tulisan terbaru, salah satunya Dewi Yulianti (2020), bahkan tulisannya juga menjadi acuan dalam menentukan daftar Bupati Semarang di dalam sebuah laman internet milik Kabupaten Semarang. Dalam karyanya, H. J. de



Graaf yang menggunakan sumber-sumber primer pun tidak membahas Ingabehi Wangsareja sebagai bupati dan salah satu empat pejabat tinggi Pesisir secara detail. Oleh karena itu, tidak ada kebaruan di dalam tulisan-tulisan sebelumnya. Atas dasar itulah, artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana relasi yang dijalin oleh Ingabehi Wangsareja sebagai salah satu dari Empat Pejabat Tinggi Pesisir dengan Mataram dan VOC serta mengaitkannya dengan berbagai peristiwa yang terjadi di Jawa pada masa modern awal. Oleh karena itu, artikel ini mengajukan beberapa pertanyaan penelitian, yaitu kebijakan apa saja yang dilakukan Susuhunan Amangkurat I dalam mengontrol Pesisir, upaya-upaya apa saja yang dilakukan Ingabehi Wangsareja dan para pejabat tinggi Pesisir lainnya dalam membangun relasi dengan Mataram dan VOC, seperti apa posisi VOC saat itu dan seperti apa respons mereka terhadap permasalahan internal yang melibatkan Mataram dan Empat Pejabat Tinggi Pesisir.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang dimulai dengan memilih topik penelitian, mengumpulkan sumber penelitian, melakukan kritik sejarah, menginterpretasi sumber, dan menyajikannya ke dalam bentuk tulisan sejarah dengan menggunakan pendekatan penelitian sejarah yang deskriptif-analisis. Oleh karena itu, artikel ini menggunakan berbagai sumber primer, mulai dari sumber lokal, seperti Babad Tanah Djawi versi C. F. Winter Sr., Babad Negari Semarang hingga arsip-arsip VOC, seperti *Corpus Diplomaticum*, *Hoge Regering* (HR), *Java's Noord Oostcust* (JNO), *Realia*, *Generaal Missiven*, *Overgekomen Briven en Papieren* (OBP) dan *Daghregister van het Casteel Batavia* yang disediakan oleh lembaga

Empat Pejabat Tinggi Pesisir: Relasi Ingabehi Wangsareja dengan Mataram dan VOC pada Pertengahan Abad ke-17 | **686**

kearsiapan, baik *Nationaal Archief* melalui laman internet www.nationaalarchief.nl maupun ANRI melalui laman internet www.sejarah-nusantara.anri.go.id. Adapun artikel ini juga akan menggunakan sumber sekunder seperti koran, artikel, buku, maupun karya ilmiah. Lingkup spasial dan temporal dalam penelitian ini adalah masa pemerintahan Ingabehi Wangsareja di Semarang pada tahun 1652 sampai 1659 karena pada tahun 1652 Ingabehi Wangsareja bersama para bupati Pesisir lainnya dilantik oleh Susuhunan Amangkurat I sebagai Empat Pejabat Tinggi Pesisir, sedangkan tahun 1659 merupakan masa di mana kehidupan Ingabehi Wangsareja berakhir karena dicopot dari jabatannya, dieksekusi atas perintah Susuhunan Amangkurat I, dan keluarganya kemudian diusir dari Kadipaten Semarang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsensus Politik Semu ala Mataram

Sejak 1651, para bupati Pesisir mendapat banyak keuntungan dari berbagai aktivitas perdagangan, terutama beras dan kayu di Pesisir Utara Jawa. Namun, mereka hanya menyerahkan upeti yang sangat sedikit ke Mataram sehingga memicu Susuhunan Amangkurat I turun tangan. Atas perintahnya, Mataram lantas memonopoli kedua komoditas itu dan melarang para bupati bawahannya untuk mengekspor langsung kepada VOC dan para pedagang asing lainnya. Susuhunan Amangkurat I kemudian mengangkat Kyai Wira dan Kyai Wirajaya menjadi komisioner bagi Pesisir yang bertugas mengawasi pelaksanaan perintah dari pusat dan menjamin semua keuntungan masuk ke kas kerajaan. Untuk menjalankan tugasnya, mereka membentuk sekelompok *panekar/tugur* yang siap turun langsung untuk menyelesaikan segala



permasalahan dengan menekan para bupati di Pesisir Utara Jawa (Chijs, 1888: 38).

Kebijakan yang justru menimbulkan perselisihan di antara para bupati Pesisir, menurunnya aktivitas perdagangan, hingga membebani penduduk dengan pajak yang tinggi itu membuat Susuhunan Amangkurat I menutup kembali semua pelabuhannya pada 1656. VOC bahkan sampai memerintahkan D. Schouten, Residen Jepara untuk menyelesaikan masalah ini tanpa ada kekerasan. Schouten pun mengambil beberapa tindakan untuk memata-matai Mataram melalui jalur laut sembari menyebarkan ketakutan akan dampak dari penutupan pelabuhan itu di Pesisir Utara Jawa maupun Pesisir Selatan Jawa. Sayangnya, Schouten tidak mendapat kabar yang menggembirakan. Kabar yang benar-benar bisa dipercaya hanyalah laporan Winrick Kieft yang mana Susuhunan mungkin memang sedang sibuk membuat undang-undang dan kebijakan baru yang berbeda dari sebelumnya (Fruin-Mees, 1932: 392).

Pada 1657, Susuhunan Amangkurat I akhirnya mengeluarkan kebijakan desentralisasi kekuasaan dengan mengangkat Empat Pejabat Tinggi Pesisir. Mereka ditempatkan di bawah koordinasi dua komisioner Pesisir yang telah dibentuk sebelumnya. Setelah pelantikan, para *panekar/tugur* dikirim untuk meminta para bupati Pesisir agar membuka kembali semua pelabuhan Mataram untuk perdagangan bebas. Para pedagang yang telah tertahan di pelabuhan selama satu setengah tahun itu akhirnya bisa kembali ke daerah asalnya dengan kapal bermuatan penuh barang-barang komoditas. Para utusan dari daerah lain pun kembali diterima oleh Mataram secara resmi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa (Graaf, 1987: 122).

Empat Pejabat Tinggi Pesisir

Susuhunan Amangkurat I mengangkat keempat bupati Pesisir menjadi Empat Pejabat Tinggi Pesisir, yaitu Tumenggung Nataairnawa membawahi Pati, Indramayu, Karawang, dan Batavia, Tumenggung Suranata membawahi Demak dan Kesultanan Palembang, Ingabehi Martanata membawahi Jepara dan Kesultanan Jambi, serta Ingabehi Wangsareja membawahi Semarang, Sedayu, dan Kerajaan Sukadana. Mereka juga bertanggung jawab atas jejaringnya dengan para pedagang asing, seperti Tionghoa, Melayu, dan lain-lainnya di daerahnya masing-masing. Para utusan dagang VOC juga menerima perlakuan yang sama yang mana semua hal yang berhubungan dengan Mataram harus dibicarakan terlebih dulu dengan para pejabat tinggi Pesisir (Jonge, 1872: 46; Hullu, 1904: 31).

Susuhunan membuat kebijakan itu bertujuan agar para bupati lebih leluasa mengelola Pesisir sehingga tercapai keuntungan maksimal dari perdagangan dan mengurangi beban pajak yang ditanggung penduduk Pesisir. Di hadapan raja, Empat Pejabat Tinggi Pesisir itu bersumpah setia akan mengelola Pesisir secara bersama-sama dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Susuhunan Amangkurat I meminta agar mereka memperlihatkan solidaritas, tanpa harus saling bersaing satu sama lain. Salah satu dari mereka akan diminta tinggal di kraton untuk memberi informasi mengenai kemajuan di Pesisir dan diganti oleh pejabat lainnya setiap dua bulan sekali (Hullu, 1904: 31; Sutherland, 1973: 133).

Salah satu dari Empat Pejabat Tinggi Pesisir itu adalah Mas Ingabehi Wangsareja, seorang Bupati Semarang yang menjabat sejak 1652. Terdapat dua versi mengenai kronologis masa pemerintahannya. Pertama, pendapat H. J. de Graaf yang menjelaskan bahwa Wangsareja



menjabat sebagai Bupati Semarang sejak 1652, kemudian diangkat menjadi pejabat tinggi Pesisir pada 1657, dan meninggal pada 1659, sedangkan B. J. O. Schrieke mempunyai pendapat yang sedikit berbeda. Menurutnya, Wangsareja sudah diangkat menjadi salah satu Empat Pejabat Tinggi Pesisir sejak 1653 atau empat tahun lebih awal dibandingkan pendapat de Graaf. Namun, Schrieke sepakat bahwa Wangsareja telah memerintah Semarang setahun sebelumnya (Graaf, 1987: 122; Schrieke, 2016: 271-272).

Pendapat kedua disampaikan Amen Budiman yang merujuk pada tulisan W. Leertouwer dan R. M. Ng. Tjokro Hadiwikromo yang menyebutkan bahwa Wangsareja sebenarnya baru menjabat sebagai Bupati Semarang pada 1659 yang mana sangat berbeda dengan pendapat yang disampaikan sebelumnya, baik de Graaf maupun Schrieke. Selain itu, dia tidak membahas sama sekali tentang jabatan Wangsareja sebagai salah satu dari Empat Pejabat Tinggi Pesisir (*De Locomotief*, 1927: 2; Hadiwikromo, 1932/1934: 135; Leertouwer, 1941: 103). Pada kenyataannya, pendapat de Graaf dan Schrieke berdasarkan pembacaan mereka atas sumber primer berupa arsip-arsip kolonial, sedangkan Amen Budiman mengutip pada sumber sekunder berupa buku-buku dan surat kabar. Oleh karena itu, pendapat de Graaf dan Schrieke dapat menjadi dasar untuk menentukan masa awal pemerintahan Bupati Wangsareja di Semarang dan bupati-bupati selanjutnya.

Semasa pemerintahannya selama tujuh tahun, Bupati Wangsareja pernah memindahkan *pendapa* Kadipaten Semarang yang awalnya berada di daerah Bubakan ke daerah Mrican Gabahan (*De Locomotief*, 1927: 2). Selain itu, dia juga pernah menerima kedatangan Rijklofs van Goens sebagai utusan VOC di Semarang pada 1653. Dalam catatan

Empat Pejabat Tinggi Pesisir: Relasi Ingabehi Wangsareja dengan Mataram dan VOC pada Pertengahan Abad ke-17 | **690**

perjalanannya, van Goens rupanya tidak hanya menyebut nama Ingabehi Wangsareja bersamaan dengan Tumenggung Nataairnawa dan dua komisioner Mataram saja (Schrieke, 2016: 267-271). Namun, dia juga menggambarkan kondisi Semarang layaknya

"[...] sebuah kota laut Jawa yang indah, tetapi tidak berpenghuni banyak, hanya dihuni oleh sekitar 20.000 sampai 25.000 keluarga rumah tangga; Yang terdiri dari (menurut pendapat saya) 30.000 pria dan 10.000 wanita dan anak-anak, yang mencari nafkah dengan menangkap ikan, menebang kayu, bercocok tanam, menggergaji, menanam padi, dan beberapa pekerjaan kasar lainnya; Para utusan raja biasanya menyambut di sini dan mengiringi para utusan Belanda dengan kereta kuda yang besar." (Goens, 1666: 2, 1856: 307)

Monopoli Perdagangan

Sejak pelantikan, Susuhunan dan keempat pejabat Pesisirnya telah menyusun berbagai rencana, salah satunya adalah melakukan monopoli dagang. Rencana itu dibuat untuk mengurangi rasa iri di antara para bupati Pesisir karena mereka sebelumnya saling memfitnah bahwa bupati yang ditunjuk oleh merekalah yang melakukan perdagangan gelap atas komoditas beras dan lain-lainnya kepada VOC, padahal semua bupati itu pernah melakukannya, setidaknya satu kali.

Pada 1657, Johan Truijtmán, *opperkoopman* VOC yang awalnya diutus untuk menemui Susuhunan Amangkurat I melihat bahwa Mataram telah membuka semua pelabuhan dan menerapkan kebijakan barunya (Hullu, 1904: 139). Para pejabat tinggi Pesisir dan para *abdi dalem*-nya menerimanya dengan ramah di Jepara. Nataairnawa yang mewakili ketiga pejabat lainnya menyampaikan bahwa pemenuhan semua daftar belanja VOC sejak saat itu harus melalui mereka dan sesuai harga yang telah ditetapkan. Saat mendengarnya, Truijtmán langsung menolak penetapan harga komoditas itu karena dianggap terlalu tinggi dan tidak realistis. Barang komoditas seperti beras, gula hitam, gula putih, papan dan balok kayu, serta garam mengalami



kenaikan yang bervariasi, mulai dari 30%, 50%, sampai 100%. Perdebatan di antara mereka pun terjadi, Truijtmann bahkan mengancam akan pergi. Ingabehi Wangsareja dan ketiga pejabat lainnya akhirnya menyelesaikan pertemuan dan pulang dengan tangan kosong (Hullu, 1904: 139-140).

Beberapa hari kemudian, Nataairnawa diam-diam mengundang kembali Truijtmann ke Pati. Sang tumenggung membocorkan bahwa harga yang telah mereka tetapkan bagaimanapun hanya mencakup beberapa komoditas saja. Di luar itu, harga komoditas seperti kayu yang ditawarkan olehnya dan Suranata tidak akan berubah. Negosiasi itulah yang menjadi penyebab awal jebolnya benteng monopoli dagang Mataram. Surat yang ditulis Nataairnawa kepada gubernur jenderal pada 27 April juga semakin menegaskan bahwa para pejabat tinggi Pesisir itu cenderung saling bersaing dan tidak memiliki tekad kuat untuk menjaga kesepakatan bersama. Oleh karena itu, VOC menyimpulkan bahwa sistem dan jabatan yang baru dibuat oleh Susuhunan Amangkurat I itu sebenarnya tidak berdampak apapun bagi perdagangan mereka (Hullu, 1904: 150-152).

Dari Penaklukan sampai Ekspedisi

Selain bertanggung jawab atas ekonomi Mataram, keempat pejabat tinggi itu juga terlibat dalam rencana Susuhunan Amangkurat I untuk menaklukan Kerajaan Bali, salah satunya saat Wangsareja dan ketiga pejabat tinggi lainnya menghadiri sebuah kegiatan peluncuran kapal dari galangan pada 8 September 1657. Rencana itu dibuat oleh Susuhunan karena Bali telah mengambil alih Ujung Timur Jawa dan mengancam kedaulatan Mataram. Setahun sebelumnya, Susuhunan Amangkurat I memang telah memerintahkan para bupati Pesisir untuk



membuat dua kapal *gobar* dan sebanyak mungkin kapal-kapal kecil sehingga membuat semua galangan di Pesisir sibuk memproduksi kapal. Hingga 1657, Mataram setidaknya telah memproduksi sekitar 12 kapal *gobar*, 24 kapal *lelanang*, dan 100 kapal *konthing*. Selain itu, Susuhunan juga telah melakukan penjajakan dengan Kesultanan Banten, Palembang, dan Makassar untuk beraliansi. Di antara ketiganya, hanya Kesultanan Palembang saja yang bisa diandalkan karena kesultanan itu memang menjadi vasal Mataram. (Hullu, 1904: 228-229).

Namun, pada Agustus 1657, rencana penaklukan Bali ditunda karena Susuhunan Amangkurat I tiba-tiba mendeklarasikan perang terhadap Kesultanan Banten. Relasi kedua kerajaan terbesar di Jawa saat itu memang mulai memburuk sejak gagalnya pernikahan Pangeran Adipati Anom dengan putri Sultan Banten dan meningkatnya perompakan yang dilakukan para bajak laut Banten terhadap kapal-kapal dagang Jawa di Pesisir. Kondisi itu semakin diperparah karena Susuhunan merasa tersindir oleh berbagai hadiah aneh yang dibawa oleh para utusan Banten untuknya. Selain itu, mereka juga dianggap lancang karena telah berani meminta 2 *lelanang*, kapal perang milik Susuhunan Amangkurat I untuk sultan mereka (Hullu, 1904: 252, 334).

Susuhunan Amangkurat I akhirnya mulai melarang semua pelabuhannya untuk menerima kapal-kapal dari Banten. Empat Pejabat Tinggi Pesisir juga telah memusatkan armada laut Mataram ke beberapa tempat, untuk satuan kapal besar dipusatkan di Jepara dan Juwana, sedangkan satuan kapal-kapal yang lebih kecil dipusatkan di Semarang, Pati, dan Tegal (Hullu, 1904: 291). Menjelang pemberangkatan, Susuhunan Amangkurat I mengulangi pernyataannya di depan keempat pejabat tingginya bahwa Kesultanan Banten harus ditaklukan. Namun, Tumenggung Nataairnawa yang sejak awal tidak menginginkan adanya penaklukan itu, kemudian dengan berani menyampaikan duduk



perkara dan pendapatnya di hadapan raja. Daripada kehilangan muka, Susuhunan menunjuk Nataairnawa sebagai komandan perang dan menyerahkan tanggung jawab itu kepadanya. Sang tumenggung yang sejak awal tidak menyetujui penaklukan itu, kemudian mengubahnya menjadi sebuah ekspedisi (Hullu, 1904: 3-5).

Tumenggung Nataairnawa mengirim dua kali ekspedisi. Ekspedisi pertama dilakukan Lurah Patra dan pasukannya dari Juwana untuk menyisir sepanjang pantai dari Jepara sampai ke Karawang. Jika bertemu orang Banten, mereka boleh dibunuh atau hidung dan telinganya dipotong saja dan kemudian dikirim ke Mataram. Ekspedisi kedua dilakukan oleh para pejabat tinggi Pesisir dengan membawa 24 kapal yang dipersenjatai menyusuri Karawang. Jika menemui kapal Banten, mereka boleh diusir atau dibakar kapalnya (Hullu, 1904: 223). Pada 13 Oktober, Mataram akhirnya memberangkatkan tentaranya, baik pasukan darat dan armada laut untuk menaklukan Banten. Pasukan darat berjumlah 40.000 orang, sedangkan armada lautnya berjumlah 70 kapal yang dipersenjatai dengan 40-60 awak per kapalnya. Mereka diperintahkan untuk menyapu bersih semua orang atau kapal-kapal Banten yang ditemui di sepanjang perjalanan (Hullu, 1904: 308, 334).

Awalnya, ekspedisi itu sempat membuat panik seisi kota Batavia. Mereka khawatir perang akan benar-benar terjadi sehingga bisa membahayakan posisi Batavia yang berada di antara dua kerajaan itu. Oleh karena itu, para serdadu VOC bersiaga di darat dan laut. Dari awak kapal yang lebih dulu sampai, VOC mendapat informasi bahwa kedatangan mereka bukanlah untuk menyerang Batavia, tetapi Kesultanan Banten. Armada Mataram ingin melindungi pelabuhan-pelabuhan Susuhunan dari orang Banten dan mengecek apakah masih ada kapal-kapal musuh di sana. Setelah tidak ada musuh, armada itu

Empat Pejabat Tinggi Pesisir: Relasi Ingabehi Wangsareja dengan Mataram dan VOC pada Pertengahan Abad ke-17 | **694**



mulai menurunkan muatan, mengisi kembali perbekalan, dan kembali begitu saja. Konvoi pasukan darat sendiri baru sampai pada pertengahan November. Tidak adanya musuh dan kekurangan perbekalan memengaruhi sebagian besar semangat para tentara itu. Dari mereka, VOC mendapat informasi yang kurang lebih sama (Hullu, 1904: 291, 308-311).

Berita ekspedisi Mataram itu rupanya lebih dulu sampai di Kesultanan Banten karena mereka telah menyiagakan sekitar 300-400 pasukan di daerah pegunungan di Selatan Batavia. Satu-satunya pertempuran yang terjadi antara Mataram dan Banten yang berujung pada ditarik mundurnya pasukan Mataram karena kekurangan perbekalan sejak awal (Jonge, 1872: 71-72). Bagi Batavia, perang yang tidak berarti ini akhirnya tidak hanya menjadi sebuah dagelan saja, tetapi juga akal-akalan Tumenggung Nataairnawa untuk menyenangkan hati Susuhunan.

Ketegangan antara Mataram dan Banten masih terus berlanjut. Sekitar akhir November, Wangsareja sempat menyita dua kapal dagang Banten dan menyuruh semua penumpangnya kembali. Mereka hanya diberi sebuah kapal tua dan sedikit perbekalan. Dia juga menitipkan pesan bahwa jika Sultan Banten tidak segera menghadap ke Susuhunan untuk meminta maaf atas kesalahannya, maka kerajaannya akan dihancurkan (Hullu, 1904: 309). Gertakan itu tentu saja tidak membuat Sultan Banten datang ke Mataram. Baru pada pertengahan 1659, relasi keduanya membaik setelah Mataram mengirim utusan dan membawa berbagai hadiah mahal untuk Sultan Banten.



Tantangan dari Susuhunan Amangkurat I

Di tengah segala persiapan rencana penaklukan, dua komisioner Pesisir, Kyai Wira dan Wirajaya tiba-tiba datang ke Semarang pada 24 Juli. Kedatangan mereka untuk menyampaikan perintah bahwa Susuhunan Amangkurat I telah mengambil solusi lain untuk mendapat keuntungan setelah gagalnya monopoli dagang Mataram. Susuhunan menyerahkan uang sebesar 10.000 *real*, versi lain menyebutkan 100.000 *real* kepada masing-masing penguasa Pesisir untuk kemudian dilipatgandakan menjadi 20.000 *real* dalam waktu setahun. Jika mereka mendapat keuntungan lebih dari itu, sisanya akan menjadi milik mereka (Hullu, 1904: 216; Chijs, 1889: 169).

Wangsareja dan ketiga pejabat tinggi lainnya kemudian memutar otak bagaimana cara untuk melipatgandakan uang pemberian dari Susuhunan dalam waktu setahun saja. Dalam kebingungan, muncul kabar mengejutkan dari seorang pedagang Tionghoa yang mengatakan bahwa perdagangan di Ambon dan Malaka saat itu bisa menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Kabar itu kemudian menyebar dengan cepat dan sampai ke telinga para pejabat tinggi Pesisir. Karena orang Jawa dilarang melintasi kedua daerah itu, Keempat pejabat tinggi itu kemudian meminta izin terlebih dulu kepada VOC. Ingabehi Martanata bersurat kepada VOC untuk meminta izin berdagang ke Ambon pada musim hujan dan ke Malaka pada musim kemarau (Hullu, 1904: 239-240). Wangsareja mengajukan surat izin dan surat jalan untuk kelima kapal *konthing*-nya dengan tujuan Ambon dan Banda. Adapun Nataairnawa meminta tiga surat izin dan surat jalan bagi ketiga kapal *konthing*-nya dengan tujuan Ambon, Banda, dan Aceh kepada VOC (Hullu, 1904: 255).



Surat izin yang tak kunjung mendapat jawaban dari *Hoge Regering* di Batavia, membuat para pejabat tinggi Pesisir itu tidak bisa menunda keinginannya lebih lama lagi. Pada 1 September, Residen Jepara melaporkan bahwa Martanata akhirnya mengirim kapal dagangnya ke Malaka hanya dengan berpegang sebuah omong kosong dari seorang Tionghoa bahwa daerah itu bisa dilewati tanpa surat jalan. Wangsareja telah mengirim satu kapal *konthing* dari Semarang ke Ambon, sedangkan Nataairnawa mengirim dua kapal *konthing* dari Juwana beberapa daerah di Barat Laut Pulau Jawa dengan membawa uang untuk membeli bahan-bahan pakaian (Hullu, 1904: 258-260).

Apa saja hasil yang mereka dapatkan dari perlombaan itu tidak diketahui, tetapi sepertinya keuntungan yang diperoleh tidak banyak atau malah defisit karena menjelang masa tenggat yang diberikan Susuhunan Amangkurat I akan berakhir, Wangsareja yang pendapatannya minus kemudian berinisiatif meminjam uang tunai kepada VOC (Chijs, 1889: 95). Meskipun minim pengalaman atau tidak berbakat sama sekali di dalam dunia dagang, keempat pejabat tinggi itu tetap saling bersaing agar bisa mendapat keuntungan yang paling banyak karena dengan cara itu mereka bisa menunjukkan siapa yang terbaik di hadapan raja.

Perkara Kuda Persia

Ketika tidak ada lagi utusan dari Batavia yang datang dan semua relasi Mataram dengan dunia luar diserahkan kepada Empat Pejabat Tinggi Pesisir, mereka juga bertugas untuk mengisi kandang kuda raja dengan kuda-kuda baru. Keempat pejabat tinggi itu berinisiatif membeli kuda Persia secara bersamaan untuk mengambil hati raja, setidaknya sebagai bentuk permintaan maaf karena sebelumnya telah gagal melakukan



monopoli dagang dan belum maksimalnya perlombaan dagang yang mereka lakukan.

Dari 8 Agustus sampai 5 September 1657, *Hoge Regering* di Batavia menerima dua kapal yang mengangkut para utusan dan surat dari keempat pejabat tinggi bahwa Susuhunan memerintahkan mereka untuk mencari kuda Persia yang bagus untuk mengisi kandangnya. Wangsareja bahkan sampai menyurati Rijklof van Goens dan Gubernur VOC di Ambon, Arnold de Vlamingh van Oudtshoorn (Hullu, 1904: 228-229, 239-240, 252-254, 254-257). Dalam surat balasannya, VOC pun mengabulkan permintaan Wangsareja dan ketiga pejabat tinggi lainnya ditambah beberapa hadiah (Hullu, 1904: 235, 258, 274-275, 278-279).

Susuhunan Amangkurat I yang melihat keempat pejabat tingginya datang menghadap dengan membawa beberapa ekor kuda, bertanya dari mana kuda-kuda itu diperoleh karena dirinya tak ingat jika pernah memesannya. Para pejabat tinggi Pesisir itu menjawab bahwa kuda-kuda itu hadiah dari gubernur jenderal di Batavia. Namun, tak ada satu pun dari kuda-kuda yang dipersembahkan kepada sang raja itu memenuhi seleranya. Susuhunan bahkan sampai mengirim sendiri enam orang sebagai utusannya ditemani para utusan dari keempat pejabat tinggi untuk membeli kuda, tetapi keinginan raja harus ditunda sesaat karena tidak ada kuda yang bagus.

Delapan bulan kemudian, para pejabat tinggi Pesisir mengirim lagi utusannya yang membawa surat permintaan serupa, tetapi permintaan itu ditolak VOC. Mereka menyarankan agar mereka menunggu kedatangan kapal *kici* dari Persia yang pasti membawa kuda-kuda bagus. Dari ketiga utusan, hanya utusan Wangsareja saja yang memilih untuk tinggal di Batavia sampai permintaan sang bupati terpenuhi. Kapal yang dinantikan akhirnya tiba di Batavia dengan membawa empat

Empat Pejabat Tinggi Pesisir: Relasi Ingabehi Wangsareja dengan Mataram dan VOC pada Pertengahan Abad ke-17 | **698**



ekor kuda Persia. Sang utusan yang mendengar kabar itu lantas mendesak VOC untuk menjual seekor kuda saja kepadanya. Agar para bupati semakin terikat oleh utang budi kepada mereka, VOC pun mengizinkannya membawa pulang seekor kuda Persia seharga 300 *real* untuk dipersembahkan kepada Susuhunan Amangkurat I (Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 1884: 69).

Berutang pada VOC

Kerja keras Wangsareja untuk mendapatkan kuda Persia agar bisa menyenangkan hati Susuhunan Amangkurat I memang membuahkan hasil, tetapi kedudukannya tidak serta merta menjadi aman. Masa tenggat pengembalian uang yang diberikan Susuhunan hampir habis, sedangkan akumulasi keuntungan yang diperoleh para pejabat tinggi Pesisir dalam melakukan monopoli dan perlombaan dagang yang mereka lakukan jauh dari target yang telah ditentukan. Wangsareja memikirkan bagaimana cara untuk menutupi kondisi keuangannya.

Wangsareja akhirnya mengirim dua orang utusan, yaitu Wangsasipatra dan Wangsacitra dengan membawa surat dan hadiah ke Batavia pada 12 Mei 1659. Ketiga pejabat tinggi lainnya ternyata juga melakukan hal yang sama. Dalam surat itu, Wangsareja memohon kepada VOC untuk memberi pinjaman berupa uang tunai sebanyak yang diizinkan oleh gubernur jenderal. Uang itu nantinya akan diserahkan kepada Susuhunan untuk melunasi semua utangnya sebesar 20.000 *real*. Jika tidak, dirinya mungkin akan kehilangan jabatannya atau seluruh harta benda miliknya akan disita kraton.

Sebagai kompensasi atas pinjaman yang diberikan, Wangsareja menjanjikan bahwa

“Jika Saudara [VOC] ingin mendapatkan sesuatu dari Semarang atau Sedayu, saya mempersilakan untuk bebas memintanya. Saya akan membiarkan semua yang bisa diperoleh serta mengikuti dan



mengizinkan semua kemauan Anda. [Karena] kepada siapa lagi saya harus memohon, jika saya membutuhkan sesuatu, selain kepada Saudara [VOC] saya sendiri. Saat ini, saya tidak memiliki apa-apa lagi untuk dikirim kepada Saudara [VOC] saya, kecuali empat ekor sapi dan empat ekor domba. [Jadi] tolong jangan menolaknya, karena itu [memang] tidak pantas [untuk dijadikan hadiah]." (Chijs, 1889: 95)

Setelah utusan Wangsareja menunggu selama dua minggu lebih, *Hoge Regering* akhirnya memutuskan bahwa mereka menolak untuk memberikan pinjaman uang kepada Wangsareja, termasuk ketiga pejabat tinggi lainnya karena berlawanan dengan semua instruksi yang telah ditetapkan (Chijs, 1889: 107). Menurut VOC, menolak permintaan para pejabat tinggi Pesisir itu memang berat, tetapi jika dipenuhi, penagihannya akan lebih berat (Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 1884: 67).

Kematian Ingabehi Wangsareja

Sekitar Juli 1659, Empat Pejabat Tinggi Pesisir dipanggil ke Mataram untuk menghadap Susuhunan Amangkurat I. Saatnya bagi mereka untuk mempertanggungjawabkan tugasnya sebagai penguasa. Untuk sementara waktu, Susuhunan menunjuk kembali Kyai Wira dan Kyai Wirajaya untuk mengurus pemerintahan di Pesisir selama keempat pejabat tinggi itu ditahan di Mataram. Menurut penilaian raja, keempat pejabat tinggi yang semula diharapkan bisa bekerja sama itu ternyata saling bersaing sehingga mereka akhirnya terpecah menjadi dua kelompok. Perpecahan itu memang disebabkan kelemahan dari peraturan yang ada. Di satu sisi, keempat pejabat itu harus bekerja sama, sedangkan di sisi lain, mereka sering kali harus bersaing karena mengemban tugas yang berbeda atau dituntut keadaan (Hullu, 1904: 112).

Empat Pejabat Tinggi Pesisir: Relasi Ingabehi Wangsareja dengan Mataram dan VOC pada Pertengahan Abad ke-17 | 700



Sepanjang masa jabatannya, Ingabehi Wangsareja dari Semarang dan Ingabehi Martanata dari Jepara memang bisa dikatakan “bersatu hati”, sedangkan Tumenggung Nataairnawa dari Pati dan Tumenggung Suranata dari Demak dianggap “sebagai satu”. Dalam beberapa hal, Wangsareja dan Martanata sering menuduh Nataairnawa sebagai seorang oposan yang memihak VOC. Sebaliknya, Nataairnawa menganggap Wangsareja sangat bertentangan dengan dirinya, sedangkan Martanata dituduh sebagai tipe pejabat yang tidak bisa dipercaya (Hullu, 1904: 112-113). Atas dasar itulah, Susuhunan Amangkurat I akhirnya menghapus jabatan Empat Pejabat Tinggi Pesisir karena dianggap sebagai pejabat yang tidak setia dan gagal dalam menjalankan tugas sehingga mempermalukan rakyat.

Bagaimanapun juga, kambing hitam harus selalu ada di dalam setiap peristiwa. Wangsareja rupanya yang harus menanggung semua kegagalan para pejabat tinggi Pesisir itu. Sebagai tangan kanan raja, Martanata mengeksekusi sang bupati atas perintah Susuhunan Amangkurat I pada 20 Agustus 1659 karena tidak bisa mengembalikan seperempat dari uang pinjaman yang diberikan Susuhunan. Martanata lantas pergi ke Semarang untuk menjatuhkan martabat Wangsareja dengan cara merampas semua keris yang dimiliki keturunan sang bupati. Di hadapan mereka, Martanata mengatakan jika Ingabehi Wangsareja dieksekusi di kraton karena suka menghasut raja, terlalu sombong, hidup bermewah-mewahan, dan terlalu berani dengan mengizinkan dan menawarkan barang-barang komoditas dari Pesisir yang notabene milik Susuhunan kepada VOC. Martanata pun melarang semua keturunan Wangsareja untuk meninggalkan kota tanpa seizinnya (Chijs, 1889: 169-170).

Tidak hanya berhenti sampai disitu saja, Martanata juga merampas keris sepasang suami istri yang sempat dipersembahkan Wangsareja



kepada Susuhunan Amangkurat I, mungkin untuk mengobati raja, dan menuduh mereka sebagai dukun yang memakai sihir untuk bersekutu dengan setan agar mengetahui rahasia-rahasia di balik tembok kraton. Selain itu, Martanata juga menginterogasi semua bawahan yang diangkat Wangsareja dalam pemerintahan dengan cara menyiksa mereka dalam keadaan tangan dan kaki terikat (Chijs, 1889: 169-170).

Konsekuensi dari kematian Wangsareja ternyata membuat beberapa perubahan. Tanggung jawab sang bupati yang sebelumnya membawahi beberapa wilayah, seperti Semarang, Sedayu, dan Sukadana itu kemudian dialihkan ke para pejabat lainnya. Martanata sepertinya mengambil alih Semarang di bawah yurisdiksi Jepara karena Martanata sempat mengundang Residen Jepara, Evert Michielsen untuk membicarakan banyak hal, termasuk proses bongkar muat kapal Westvrieslandt di Semarang, setelah kematian Wangsareja (Chijs, 1889: 190). Penguasaan Sedayu sendiri diserahkan kepada Kyai Ranga Sedayu di bawah yurisdiksi Pati (Chijs, 1889: 195-196), sedangkan pejabat yang bertanggung jawab atas Sukadana tampaknya dilanjutkan lagi karena pengaruh Mataram terhadap vasal itu juga mulai melemah seiring waktu (Chijs, 1889: 208).

KESIMPULAN

Artikel ini telah menghadirkan studi yang rinci terkait berbagai relasi yang terjalin di antara Ingabehi Wangsareja, Empat Pejabat Tinggi Pesisir, Mataram, dan VOC. Masa pemerintahan Wangsareja telah membantu penelitian ini untuk memahami bahwa berbagai dinamika yang muncul dari relasi-relasi yang telah mereka jalin memiliki konsekuensi masing-masing. Toh, sama-sama bertaruh nyawa, daripada melawan arus kebijakan yang berisiko terhadap hilangnya wilayah pemerintahannya dari peta Mataram, Empat Pejabat Tinggi Pesisir itu akhirnya

harus beradaptasi dengan semua rencana kebijakan yang digulirkan oleh kraton. Setidaknya, harapan itu masih ada saat berhasil menjalankan tugasnya akan dipromosikan jabatannya oleh raja dan naiknya status sosial Wangsareja di mata masyarakat.

Tidak bisa dimungkiri bahwa masa pemerintahan Susuhunan Amangkurat I penuh dengan dinamika karena dirinyalah raja yang paling sering merombak kebijakan bagi Pesisir dan jabatan para bupati bawahannya. Ironisnya, dari sekian bupati yang memerintah Semarang semasa Susuhunan Amangkurat I, sebagian besar dari mereka menjadi korban kebijakan sang raja. VOC dan para pedagang lain pun juga mengalami hal serupa, tetapi pengaruh VOC bagaimanapun juga masih terlalu kecil untuk menekan raja. Meskipun demikian, para bupati Pesisir diam-diam menganggap VOC sebagai kekuatan asing yang bisa menguntungkan, setidaknya untuk perdagangan sehingga mereka saling berlomba untuk memanipulasi bisnis Mataram dan mendekati VOC demi kepentingannya masing-masing.

Selain itu, berdasarkan interpretasi pada sumber primer berupa arsip-arsip VOC, artikel ini telah menunjukkan bahwa tahun 1652 sampai 1659 menjadi rentang waktu masa pemerintahan Ingabehi Wangsareja. Pembabakan waktu pemerintahannya terbagi ke dalam tiga masa, yaitu saat menjadi Bupati Semarang, diangkat menjadi salah satu Empat Pejabat Tinggi Pesisir, dan kematiannya. Oleh karena itu, artikel ini setidaknya dapat mengoreksi pada daftar Bupati Semarang di laman internet dan penelitian-penelitian sebelumnya agar penelitian selanjutnya lebih bisa dipertanggungjawabkan dari sisi keilmuan sejarah.

Berawal dari relasi-relasi para bupati inilah, penelitian ini diharapkan dapat memancing keinginan para peneliti lainnya untuk menelusuri sedikitnya dua hal, yaitu sejarah lokal di Semarang dan sejarah periode VOC karena peluang penelitian tentang keduanya masih sangat besar. Hal itu berdasarkan kenyataan bahwa sumber primer berupa arsip-arsip VOC sendiri jumlahnya sangat melimpah, tetapi tidak



sebanding dengan jumlah peneliti yang memiliki minat untuk mengkaji periode tersebut. Topik penelitian baru setidaknya bisa dikembangkan dengan melihat aspek-aspek lain dari suatu peristiwa sejarah di periode tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

- Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 1884, *Realia: Register op de Generale Resolutien van het Kasteel Batavia 1632-1805, Eerste Deel*. ('s-Gravenhage: Martinus Nijhoff).
- Chijs, J. A. van der, (Ed.), 1888, *Dagh-register gehouden int Casteel Batavia vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts-India anno 1653*, ('s-Gravenhage: Martinus Nijhoff).
- Chijs, J. A. van der, (Ed.), 1889, *Dagh-register gehouden int Casteel Batavia vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts-India Anno 1659*, ('s-Gravenhage: Martinus Nijhoff).
- Hullu, J. de, (Ed.), 1904, *Dagh-register gehouden int Casteel Batavia vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts-India anno 1656-1657*, ('s-Gravenhage: Martinus Nijhoff).
- Jonge, J. K. J. de, (Ed.), 1872, *De Opkomst van het Nederlandsch Gezag in Oost-Indie: Verzameling van Onuitgegeven Stukken uit het Oud-Koloniaal Archief, Zesde Deel*, ('s-Gravenhage: Martinus Nijhoff).

Koran

De Locomotief, 19 September 1927.

Buku dan Artikel Jurnal

- Amen Budiman, 2021, *Sejarah Semarang*, (Semarang: Sinar Hidoep).
- Anonim, 1953, *Kota Besar Semarang*, (Semarang, Djawatan Penerangan).
- Fruin-Mees, W., 1932, "Winrick Kieft en zijn Rapport over zijn Gezantschap naar Mataram in 1655", dalam *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land-, en Volkenkunde, Deel LXXII*, (Batavia: Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen).
- Goens, R. Van, 1666, *Javaense Reyse gedaen van Batavia over Samarangh na de Konincklijke Hoofd-plaets Mataram*, (Dodrecht: Vincent Caimax).



- Goens, R. van, 1856, "Reijsbeschrijving van den Weg Uijt Samarangh nae de Konincklijke Hoofdplaets Mataram, Mitsgaders de Zeeden, Gewoonten ende Regeringe van den Sousouhounan, Groot Machtigste Koningk van 't Eijlant Java", dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Volume 4: Issue 1, 1 Jan. 1856*, (Leiden: KITLV Press).
- Graaf, H. J. de, 1987, *Disintegrasi Mataram dibawah Mangkurat I*, (Jakarta: Pustaka Grafitipers).
- Leertouwer, W., 1941, *Semarang als Industrieel, Commercieel, en Cultureel Centrum: ter Gelegenheid van het 35-Jarig Bestaan van de Gemeente Semarang*, (Semarang: Administratie Kantoor A. C. Van Pernis).
- Nagtegaal, Luc, 1996, *Riding The Dutch Tiger: The Dutch East Indies Company and The Northeast Coast of Java 1680-1743*, (Leiden: KITLV Press).
- R. M. Ng. Tjokro Hadiwikromo, 1932/1934, *Pakem: Sadjarahe Poro Familie Naloerine Leloehoer ing Pati lan Djoewono Sapitoeroete*, (Tanpa tempat: Tanpa Penerbit).
- Schrieke, B. J. O., 2016, *Kajian Historis Sosiologis Masyarakat Indonesia: Kumpulan Tulisan Terpilih, Jilid 2*, (Yogyakarta: Ombak).
- Soekirno, 1956, *Semarang*, (Semarang: Djawatan Penerangan).
- Soemarsaid Moertono, 1985, *Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau: Studi tentang Masa Mataram II, Abad XVI sampai XIX*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia).
- Sutherland, Heather, 1973, "Notes on Java's Regent Families: Part I", dalam *Indonesia*, No. 16 (October, 1973), (New York: Southeast Asia Program, Cornell University).
- Yuliati, Dewi, dkk., 2020, *Riwayat Kota Lama Semarang dan Keunggulannya sebagai Warisan Dunia*, (Semarang: Sinar Hidoep).

Laman Daring

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Bupati_Semarang